

KONFLIK DAN HARMONI KEHIDUPAN NELAYAN NAGARI AIRHAJI PESISIR SELATAN (1998-2017)

Conflict and Harmony of Nagari Airhaji Pesisir Selatan Fisherman (1998-2017)

Sri Haryati Putri

Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Pos-el: sriharyatiputri05@gmail.com

Naskah diterima: 5 Januari 2020; direvisi: 17 Mei 2020; disetujui: 15 Juni 2020

Abstrak

Nagari Air Haji, perkampungannya didominasi dengan wilayah perairan dan pantai. Sebagai wilayah pesisir pantai, dinamika masyarakat juga memiliki keterikatan yang erat dengan laut. Dinamika konflik antar sesama nelayan menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Penulisan ini membahas tentang konflik sosial nelayan tradisional di Air Haji. Persaingan nelayan *trawl* dengan nelayan tradisional tidak seimbang dan lebih merupakan penindasan. Tentu nelayan *trawl* makin berjaya di tengah tersingkirnya nelayan tradisional. Adapun organisasi sebagai wadah peningkatan kapasitas nelayan, ternyata hanyalah sebuah cara bagi mereka untuk mendapatkan program bantuan. Sementara peraturan dan ketetapan melaut yang tercantum dalam organisasi tetap mereka langgar. Namun, Organisasi telah mempertemukan ketiga elemen ini dan saling bekerja sama untuk memajukan perekonomian masyarakat nelayan. Baik bagi sesama nelayan, nelayan dengan masyarakat dan nelayan dengan pemerintah. Organisasi secara tak langsung telah memberikan secercah pengharapan bagi nelayan untuk merubah hidup supaya keluar dari belenggu kemiskinan. Meskipun hasil yang didapatkan belum maksimal, tetapi telah menjadi dinamika konflik dan harmoni dalam kehidupan nelayan. Harmoni tersebut semakin terlihat pada prinsip patron-klien yang diterapkan oleh semua nelayan, baik juragan dan anak buah tercipta hubungan sosial yang begitu erat, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah kekerabatan.

Kata Kunci: *nelayan; konflik; harmoni; organisasi nelayan; patron-klien*

Abstract

Nagari Air Haji, the village is dominated by waters and coastal areas. As a coastal area, community dynamics also have a close attachment to the sea. The dynamics of conflict between fellow fishermen is inevitable. This writing discusses the social conflict of traditional fishermen in Air Haji. Trawling fishermen competition with traditional fishermen is not balanced and is more oppression. Of course trawling fishermen prospered amid the elimination of traditional fishermen. As for the organization as a forum to increase the capacity of fishermen, it turns out that it is only a way for them to get assistance programs. While the rules and provisions of the sea that are listed in the organization they still violate.. Good for fellow fishermen, fishermen with the community and fishermen with the government. The organization has indirectly provided a glimmer of hope for fishermen to change lives so that they can escape poverty. Although the results obtained are not optimal, but have become the dynamics of conflict and harmony in the lives of fishermen. This harmony is increasingly seen in the patron-client principle applied by all fishermen, both the skipper and subordinates, creating a very close social relationship, even though they do not have kinship relations.

Keywords: *conflict; fishermen; harmony; fishing organization; patron-client*

PENDAHULUAN

Nagari Air Haji yang terdapat di penghujung selatan Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan sebuah nagari

dengan menampilkan potret kehidupan masyarakat nelayan tradisional, yang menggerakkan aktivitas perekonomiannya adalah sektor

kelautan. Secara geografis Nagari Air Haji terletak di garis pantai dan merupakan wilayah pesisir laut yang perekonomian masyarakatnya memanfaatkan potensi laut. Iklim pantai jelas terasa bila menginjakkan kaki di nagari ini. Masyarakat Air Haji tergolong ke dalam masyarakat maritim. Masyarakat maritim yang berada di wilayah pesisir pantai, melakukan segala aktifitas kehidupannya di wilayah perairan atau laut yang terbentang luas dihadapan wilayah pesisir pantai tempat tinggalnya. Adapun mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan, meliputi kegiatan menangkap ikan, membuat perahu, memperbaiki perahu, membuat jaring dan menjual hasil tangkapan ikan. Selain dari itu, para nelayan juga melakukan kegiatan bercocok tanam, tapi hanya sekedar pemenuhan kebutuhan pokok. Seperti menanam padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan. Hasil dari bercocok tanam tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Zaiyardam Zubir, 2008: 158).

Perkampungannya nelayan Nagari Air Haji didominasi dengan wilayah pantai. Sebagai wilayah pesisir pantai, dinamika masyarakat juga

memiliki keterikatan yang erat dengan laut. Bukan berarti mereka menggantungkan hidup sepenuhnya dari hasil laut sebagai nelayan, akan tetapi mereka memiliki mata pencaharian yang lain seperti pertanian, perdagangan, dan mencari hasil hutan. Namun, dengan berbagai macam profesi masyarakat selain daripada nelayan, potensi kelautan dan ekonomi perikanan menjadi faktor utama dalam pembangunan dan perkembangan nagari ini.

Perikanan merupakan sistem yang kompleks, karena banyak pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkannya. Pihak yang paling vital adalah nelayan kecil yang merupakan lapisan yang cukup banyak. Mereka ini sebagian hidup di wilayah terpencil dengan alternatif pekerjaan yang terbatas sehingga mereka hidup dalam kemiskinan. Rendahnya penghasilan nelayan tradisional sebagai salah satu sub sistem masyarakat pedesaan pantai, karena teknologi penangkapan ikan laut pada umumnya masih rendah atau masih menggunakan peralatan tradisional (Soemardjan, 1992: 353).

Kehidupan mereka dari hari ke hari sangat fluktuatif karena pendapatan

dari hasil menangkap ikan selain rata-rata kecil juga bersifat tidak pasti, apalagi pada saat musim badai datang. Kadang-kadang hingga sehari-hari mereka tidak dapat melaut dikarenakan ombak dan angin yang sangat besar dan kencang, sementara dapur mereka menuntut untuk terus mengepul. Lain halnya dengan kehidupan nelayan modern, dimana mereka rata-rata merupakan keluarga yang kaya, atau bisa dikatakan serba berkecukupan. Mereka mempunyai kapal-kapal motor yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan yang lumayan baik, dimana rata-rata dari mereka menggunakan alat tangkap jaring trawl atau jaring pukat harimau. Dari sisi sosial ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Sementara itu, nelayan tradisional tetap saja miskin dan hidup terbelakang dari masyarakat lainnya (Antoni Wijaya, 2009: 353).

Meskipun demikian, kehidupan nelayan begitu menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Mulai dari masalah kemiskinan, keterbatasan modal, teknologi, hingga pasar dan modal,

tidak menyurutkan langkah seorang nelayan untuk melanjutkan penghidupan (Kusnadi, 2009: 28). Mereka memiliki hubungan yang begitu harmonis antara sesama nelayan. Terutama antara nelayan juragan dan anak buahnya. Hal ini didasari dengan adanya rasa memiliki bersama dalam diri masyarakat nelayan untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan. Walaupun, terkadang konflik dan kecemburuan sosial antar sesama nelayan menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Namun, masih dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga konflik yang terjadi, dapat terselesaikan secara baik, tidak berhubungan dengan badan hukum apalagi sampai ke meja hijau.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang dibagi kedalam empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Louis Gottchalk, 2007: 50). Mestika Zed mengatakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh

proses yang berwujud historiografi. Dalam hal ini metode sejarah digunakan agar dapat merekonstruksi kembali peristiwa masa lampau, sehingga dapat di uji kebenarannya (Mestika Zed, 1999: 31).

Tahap pertama, yakni heuristik (pengumpulan sumber). Sumber-sumber yang didapatkan dari hasil studi perpustakaan dan hasil wawancara dengan pelaku sejarah yang dapat dijadikan sebagai informan. Studi pustaka dilakukan ke berbagai perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat, khususnya kota Padang. Seperti, penelusuran pustaka pusat Unand, pustaka PPs Unand, pustaka jurusan Magister (S2) Unand serta pustaka pusat UNP, kemudian tak ketinggalan perpustakaan daerah Sumatera Barat. Arsip Provinsi Sumbar, arsip kota Padang, dan BPS kota Padang. Selanjutnya, sumber penting lainnya dapat ditemukan di kantor arsip daerah Pesisir Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Selatan, dan BPS Pesisir Selatan.

Selain menggunakan sumber tulisan, sumber lisan tak kalah pentingnya dalam merekonstruksi fakta sejarah. Hal ini bisa dilakukan dengan wawancara. Wawancara bisa dilakukan

kepada pelaku sejarah yang masih hidup yang terlibat langsung dengan dunia niaga dan para saudagar ikan pemilik bagan yang ada di nagari Air Haji. Diantaranya, Barat Alui (BA), Japri (A. Sel), Inal PI (Pantai Indah), Jondri (BA), Asis (Karsam), serta para nelayan lainnya yang tersebar di nagarian Air Haji.

Tahapan kedua adalah melakukan kritik sumber. Sumber yang telah didapat terlebih dahulu dilakukan kritik intern (untuk memastikan kebenaran isi) dan kritik ekstern (untuk mencari keaslian sumber). Kritik ekstern ini pada dasarnya bertujuan untuk melihat apakah sumber-sumber yang telah didapat tadi benar-benar asli. Sedangkan kritik intern bertujuan untuk memastikan kebenaran isi yang telah didapat dari sumber-sumber tersebut

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi data, setelah melalui tahapan kritik sumber, kemudian dilakukan tahap interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dari arsip, buku-buku yang relevan dengan sejarah sejarah maritim serta perdagangan laut yang maupun hasil penelitian langsung di lapangan. Tahapan ini menuntut kehati-hatian dan integritas penulis untuk menghindari

interpretasi yang subyektif terhadap fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah.

Tahap terakhir adalah historiografi. Historiografi merupakan proses penulisan fakta-fakta yang diperoleh dari data-data yang ada. Proses penulisan dilakukan agar fakta-fakta yang telah diinterpretasikan satu sama lain dapat disatukan sehingga menjadi satu perpaduan yang sistematis dalam bentuk narasi kronologis. Tahap-tahap penulisan mencakup interpretasi sejarah, eksplanasi sejarah sampai kepada presentasi atau pemaparan sejarah sebenarnya bukan merupakan tiga kegiatan terpisah melainkan bersamaan. Hanya untuk kepentingan analisis disini dipisahkan agar lebih mudah dipahami (Helius Sjamsudin, 2012: 121).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan di Nagari Air Haji

Pada setiap kecamatan di bawah administratif pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terdapat satu orang penyuluh perikanan. Memiliki tugas dalam menjalankan program kerja di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Setiap kelompok nelayan dibina dan diberdayakan oleh penyuluh tersebut. Tujuan dari pembentukan kelompok nelayan oleh pemerintah adalah menumbuhkan tingkat kepercayaan diri para nelayan, karena pada umumnya kelompok nelayan memiliki SDM yang rendah, merasa hidup susah dan miskin sehingga memiliki pergaulan yang terbatas, maka dibentuklah organisasi berupa kelompok-kelompok nelayan yang merupakan sebuah wadah bagi nelayan untuk mengembangkan diri, baik secara materi maupun kerjasama dalam kelompok (*Wawancara*, Afriman Julta, tanggal 16 Agustus 2018).

Tugas dari penyuluh perikanan tergantung pada permintaan dan kebutuhan masyarakat. Menerapkan dan memberikan pembinaan pada nelayan. Namun program yang akan terealisasi pada tahun 2019 merupakan program penggantian alat tangkap, dari sebelumnya menggunakan pukot hamparan dasar diganti dengan jaring yang disebut dengan gillnet. Sebanyak 115 buah kapal yang telah tercatat milik nelayan di Kenagarian Air Haji akan dilakukan bantuan alat tangkap tersebut. Sementara itu, menjelang tahun 2019 nelayan masih diberi kelonggaran untuk melaut dengan menggunakan alat

tangkap Hamparan Dasar tersebut, asalkan tidak melaut hingga ke lokasi nagari tetangga. Misalnya, nelayan di Kenagarian Air Haji tidak bolehkan melaut sampai ke daerah Muaro Kandis, Muaro Jambi, Muaro Sakai beserta nagari tetangga lainnya, begitupun sebaliknya. Namun, hal ini justru membuat nelayan sering melakukan bentrok dengan nagari tetangga, banyak kasus pertikaian telah terjadi antar sesama nelayan termasuk juragan dan anak bagan. Pada tahun 2014 telah terjadi pembakaran kapal antara nelayan Muaro Air Haji dengan nelayan di Muaro Kandis. Bentrokan tak dapat dielakkan, yang menimbulkan kerugian bagi nelayan itu sendiri. Kalau hal semacam ini telah terjadi, maka pemerintah daerah setempat tidak akan tanggung jawab akan hal itu (Wawancara, Aswardi Bakar, tanggal 23 Agustus 2018).

Dalam kasus lain, terjadinya konflik antara nelayan Kenagarian Air Haji Tanjung Kandis dan Pulau Rajo Inderapura. Konflik ini terjadi akibat adanya perbedaan penggunaan alat tangkap oleh nelayan. Nelayan Tanjung Kandis menggunakan Pukat Hamparan Dasar yang tergolong sudah canggih. Alat tangkap ini tergolong pada jenis

alat tangkap *mini trawl* dan dianggap dapat merusak habitat dan ekosistem laut. Sedangkan, nelayan Pulau Rajo Inderapura masih menggunakan alat tangkap yang masih bercorak tradisional yaitu Pukat Tepi. Konflik nelayan ini terjadi pada tahun 1998, diawali dengan masuknya nelayan Tanjung Kandis yang menggunakan Pukat Hamparan dasar kewilayah pantai Pulau Rajo Inderapura. Pada tahun 1998 nelayan Pulau Rajo melakukan Razia Penangkapan Kapal dan alat tangkap nelayan Hamparan Dasar, dalam aksi ini nelayan Pulau Rajo tidak hanya menangkap kapal dan alat tangkap, tetapi masyarakat nelayan Pulau Rajo juga membakar kapal dan alat tangkap tersebut (Nina Purniati, 2014: 43)

Persaingan trawl dengan nelayan tradisional ibarat pertarungan “Macan dengan Kambing”, yang mustahil Kambing akan memenangkannya. Tentu nelayan trawl makin berjaya di tengah tersingkirnya nelayan tradisional. Sebenarnya konflik sosial pun terjadi, nelayan trawl ini dikawal dan dilarang keras oleh pemerintah setempat. Namun, nelayan ini tetap membandel dan tidak mengindahkan peraturan yang telah dibuat. Tentu hal ini dilakukan bukan tanpa alasan,

tuntutan dan biaya hidup yang semakin meningkat ditambah dengan bekal dan bahan bakar bagan selama melaut yang tidak murah, mengharuskan juragan pemilik bagan menggunakan alat tangkap trawl (pukat harimau) sebagai alternatif yang telah terbukti menguntungkan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, tahun 2015)

Keputusan Keppres No. 39/1980 yang melarang pengoperasian trawl tidak berjalan optimal. Ada dorongan ekonomis mengapa trawl masih terus dioperasikan, yakni karena harus diakui trawl merupakan alat penangkap ikan khususnya udang yang sangat efisien, sehingga tidak ada satupun negara yang melarang pengoperasian alat tangkap trawl kecuali di Indonesia, tanpa terkecuali nelayan di Kenagarian Air Haji dan secara umum Kabupaten Pesisir Selatan. Akan tetapi, pertimbangan ekologis dan sosial yang justru mendorong trawl untuk tetap dilarang.

Dalam posisi dilematis seperti ini, pemerintah tengah merancang kebijakan seputar trawl. Pemerintah pusat akan mengizinkan pengoperasian trawl secara resmi apabila nelayan dan pemerintah daerah yang memintanya. Akan tetapi, bila permintaan itu tidak

ada, pengoperasian pukat harimau tetap dilarang sesuai Keppres No. 39/1980. Alternatif lain yang bisa dilakukan untuk mengoperasikan trawl adalah memberikan kesempatan kepada nelayan tradisional memiliki alat penangkap ikan tersebut. Selanjutnya, menurut pemerintah perlu membuat Keppres baru yang intinya memberdayakan nelayan dengan skala kecil sebagai penyempurnaan Keppres No.39/1980. Namun, belum teraplikasi hingga kini (*Arsip* Dinas Perikanan Kecamatan Linggo Sari Baganti, tahun 1998).

Upaya pemerintah untuk meredam segala sifat dan watak keras karakter dari nelayan adalah pemerintah menyediakan suatu wadah berupa organisasi kelompok nelayan. Organisasi nelayan yang mewadahi aspirasi para nelayan adalah organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), nelayan Kabupaten Pesisir Selatan termasuk nelayan Kenagarian Air Haji secara umum tergabung ke dalam DPC HNSI Pesisir Selatan. Himpunan ini adalah induk dari nelayan atau rumahnya bagi nelayan dimana tugas dan fungsinya adalah untuk mengkoordinir semua kegiatan dan program kesejahteraan nelayan.

Namun, adapun organisasi sebagai wadah peningkatan kapasitas nelayan, ternyata hanyalah sebuah cara bagi mereka untuk mendapatkan program bantuan peralatan untuk melaut. Sedangkan peraturan dan ketentuan melaut yang tercantum dalam organisasi tetap mereka langgar, seperti menggunakan pukot hamparan dasar atau pukot harimau sebagai alat tangkap dalam melaut jelas sudah melanggar peraturan organisasi. Namun, para nelayan seolah-olah menutup mata akan hal itu, sulit untuk merubah gaya melaut para nelayan sehingga organisasi ini pun tidak berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya (*Profil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tahun 2018*).

Pemerintah melalui program usaha pemberdayaan masyarakat pesisir memberikan bantuan kepada setiap kelompok nelayan apabila diuangkan senilai seratus juta rupiah. Namun, untuk meminimalisir ketimpangan yang akan terjadi supaya bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuan sebenarnya, maka, pemerintah melalui dinas terkait membelikan semua keperluan alat tangkap dengan menggunakan uang yang telah dianggarkan kepada kelompok nelayan

tersebut. Karena apabila telah diberikan sejumlah uang kepada kelompok nelayan, seringkali uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan diberikannya bantuan (*Wawancara, Afriman Jultan, tanggal 16 Agustus 2018*).

Dari pusat, bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing kelompok. Dinas hanya mengawasi dan membina kelompok agar dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya. Kelompok diberikan bimbingan dan pembinaan oleh tenaga penyuluh kecamatan sehingga mereka bisa meningkatkan sektor perikanan. Pemerintah selalu berupaya agar kelompok nelayan yang diusulkan memperoleh bantuan dari pemerintah untuk kegiatan pengembangan usaha perikanan dengan melakukan menyeleksi secara ketat, sehingga kelompok tersebut betul-betul memenuhi syarat mendapatkan bantuan (*Wawancara, Aswardi Bakar, tanggal 23 Agustus 2018*).

Gambar 1
Penyerahan Bantuan pada Kelompok Nelayan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan

Sebelum memberikan bantuan kepada nelayan, Pemerintah Daerah (Pemda) di bawah bagian dinas perikanan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan *survey* lapangan terlebih dahulu. Tentu didampingi oleh penyuluh perikanan yang ada di Kecamatan tempat tinggal nelayan penerima bantuan tersebut, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan tersebut memang berprofesi sebagai nelayan dan kekurangan modal dalam memperoleh alat tangkap beserta peralatan melaut lainnya. Semua ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan digunakan sebaik-baiknya oleh nelayan tersebut. Namun, kondisi di lapangan dapat ditemukan bahwa ada dari kelompok nelayan tersebut yang memasukkan anggota yang bukan berprofesi nelayan. Misalnya, kerabat

dekat atau sanak saudara dari ketua maupun anggota dari kelompok nelayan tersebut (*Koran Singgalang*, Edisi Selasa 28 Agustus 2012). Pemerintah membolehkan hal ini, tentu hanya sebagai pengurus kelompok dan tidak berhak sebagai penerima bantuan. Namun, ini hanyalah sebatas teori dan dalam pengaplikasian tetap saja mereka yang bukan berprofesi sebagai nelayan masuk kelompok nelayan kemudian telah menerima sejumlah bantuan dari program pemerintah tersebut.

Sulit untuk menghindari hubungan kekeluargaan dalam hal penerimaan bantuan, mereka lebih mendahulukan keluarga dekat dibandingkan dengan nelayan yang berhak sebagai penerima bantuan. Sehingga, bantuan yang diberikan seringkali tidak tepat sasaran, tak jarang bantuan yang telah diberikan, misalnya berupa mesin tempel, jaring dan alat tangkap lainnya, dijual kembali oleh penerima bantuan tersebut, karena memang tidak digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Inilah akibatnya penerima bantuan bukan dari mereka yang berprofesi nelayan. Berbagai upaya telah dilakukan, namun kelompok nelayan berusaha untuk melindungi siapa saja

yang ada di dalam kelompoknya dan saling bekerja sama menyembunyikan ketimpangan yang ada. Sehingga, kelompok nelayan yang dibentuk seringkali tidak berjalan dan dikategorikan kelompok nelayan yang tidak aktif sehingga tidak menutup kemungkinan kelompok nelayan akan bubar (*Wawancara*, Afriman Julta Kabid, tanggal 16 Agustus 2018).

Selama ini, pengelolaan sumber daya perikanan hanya masih bertumpu pada penerapan perizinan penangkapan yang dikenal dengan SIUP (Surat Izin Usaha Penangkapan). Akan tetapi, adanya sistem perizinan saja memang belum cukup untuk dijadikan *instrument* dalam pengelolaan sumber daya. Beragam kendala, masih sering ditemui. Pada umumnya, pihak pemilik kapal telah berusaha untuk mengurus surat izin kapal ke kantor dinas terkait, tetapi beragam kendala sering kali dialami. Diantaranya, dipersulit untuk mengurus administrasi dan kesulitan menemui kepala badan yang harus dituju. Jarak antara daerah tempat tinggal dengan Kota Padang sebagai pusat ibukota provinsi memakan perjalanan 5-6 jam, tentu butuh modal dan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu, mereka tidak bisa seringkali

datang untuk mengurusnya, mengingat kesulitan dan kendala yang ada. Maka, tak jarang mereka seringkali kecewa, karena telah jauh-jauh datang tanpa menghasilkan apa-apa. Inilah yang menyurutkan langkah semua pemilik kapal belum mengurus surat izin kapalnya. Mereka telah berusaha, tapi seringkali sia-sia karena tak kunjung selesai dalam waktu yang singkat (*Wawancara*, Ijon, tanggal 01 Agustus 2018).

Oleh karena itu, kelompok-kelompok ini masih berjalan tidak maksimal dan masuk ke dalam kategori tidak aktif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari nelayan untuk memanfaatkan organisasi kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya terutama dalam hal perekonomian. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Seperti, nelayan hanya berkumpul sesaat akan menerima bantuan saja dan program-program yang dirancang oleh pemerintah melalui kelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, tujuan dari dibentuknya kelompok nelayan sebagai wadah bagi nelayan untuk mengembangkan perekonomiannya tidak tercapai secara maksimal (*Wawancara*, Aswardi Bakar, tanggal 23 Agustus 2018).

Harmoni yang Terjalin antar Sesama Nelayan di Nagari Air Haji

Masyarakat nelayan di daerah ini terpusat di nagari Muaro Gadang dan nagari Muaro Air Haji. Kedua nagari tersebut merupakan kawasan pemukiman yang pada umumnya masyarakat bekerja sebagai nelayan. Juragan pemilik bagan merupakan kelompok paling dominan dalam menopang perekonomian orang banyak, terutama anak buah yang bekerja pada usaha dagang yang ia jalankan. Secara tak langsung peran yang melekat pada diri seorang juragan telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat nelayan, antara lain:

1. Terbukanya Lapangan Kerja

Profesi nelayan tidak harus menamatkan pendidikan dalam jenjang ilmu tertentu, cukup memiliki kemauan dan berani melaut dengan segala bentuk resiko yang akan dihadapi. Tentu ini tidaklah mudah dan tidak semua orang dapat menjalaninya sebagai mata pencaharian untuk menyambung hidup. Profesi ini butuh seseorang yang bermental baja. Mereka memiliki pengetahuan navigasi, cuaca, angin, dan badai karena apapun dapat terjadi apabila kapal telah memasuki muara laut lepas. Tidak jarang amukan badai

dapat mengakhiri hidup seorang nelayan dan tenggelam dengan kapal beserta isinya.

Seorang nelayan merupakan pekerja-pekerja handal yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Tanpa banyak pertimbangan, seorang juragan menerima siapapun yang mau bekerja baik sebagai ABK maupun buruh gudang tempat letak ikan setelah proses pengawetan. Pada tahun 2016 penduduk Kecamatan Linggo Sari Baganti termasuk didalamnya masyarakat nagari Air Haji, tercatat bahwa 2562 orang yang berprofesi sebagai nelayan penuh dan nelayan sambilan berjumlah 756 orang (*Data Statistik* Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, tahun2016). Baik nelayan penuh maupun nelayan sambilan, mereka bekerja dibawah usaha-usaha dagang yang dijalankan oleh para juragan pemilik bagan. Para pekerja ini biasanya berumur sekitar 18 ke atas, dari yang muda hingga yang paling tua asalkan berjenis kelamin laki-laki dapat diterima oleh juragan untuk bekerja pada usaha perikanan yang dijalanannya.

2. Peminjaman Modal Kepada Nelayan Buruh

Hubungan emosional dan sosial antar sesama nelayan terjalin begitu

erat, terutama hubungan antara juragan dan anak bagan sebagai pekerjanya. Hubungan kekerabatan seperti itu dapat terlihat pada peminjaman modal dari juragan kepada nelayan buruh agar nelayan tersebut juga dapat menangkap ikan di laut. Peminjaman modal tersebut bisa berupa uang maupun perahu dan alat-alat penangkapan ikan yang menjadi kebutuhan seorang nelayan. Secara tidak langsung dengan adanya gotong royong dan tolong menolong seperti itu dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi nelayan terutama nelayan buruh yang kekurangan modal. Salah satu alternatif tempat peminjaman uang hanyalah pada juragan.

Kehidupan seolah-olah tak adil bagi orang nelayan, yakni bagi mereka yang menggantungkan penghidupannya pada sumber daya laut. Mulai dari penjemur ikan, buruh nelayan, anak buah kapal, hingga juragan sang pemilik kapal mengalami diskriminasi dari dunia perbankan. Betapa tidak, usaha yang berbasis kelautan, tidak bisa menjadi jaminan dari pihak bank untuk memperoleh pinjaman sebagai modal, karena seringkali paradigma orang darat yang berpandangan bahwa usaha yang beroperasi dengan memanfaatkan laut

sebagai modal utama, sewaktu-waktu dapat dengan mudahnya hancur dan bahkan jatuh bangkrut.

3. Memperkuat Sistem Keluarga dan Sosial antar Sesama Nelayan

Hubungan sosial antara juragan dan anak bagan tidak hanya cukup memberikan bantuan berupa pinjaman modal kepada buruh nelayan. Seorang juragan senantiasa untuk menjalin hubungan kekerabatan dengan anak buahnya dan mempererat rasa persaudaraan antara sesama anak buahnya tersebut, karena sesama mereka saling membutuhkan dan tolong menolong. Walaupun, pada umumnya mereka tidak diikat dengan hubungan tali darah persaudaraan. Rasa persaudaraan mereka hanyalah diikat akan kesamaan rasa senasib dan sepenanggungan. Tetapi, seorang juragan telah menganggap anak buahnya bagian dari keluarga yang patut untuk diberikan bantuan.

Seperti, yang tengah dialami oleh Silas merupakan seorang janda yang ditinggal selama-lamanya oleh suami tercinta yang bernama Datuak. Nasib yang telah mengharuskan dirinya harus berpisah dengan suami. Kejadian naas menimpa Datuak meninggal sewaktu ia pergi melaut dengan sebuah bagan milik juragan yang tak jauh dari

rumahnya. Kapal yang ditumpangi Datuak dihantam oleh gelombang yang akhirnya menenggelamkan Datuak beserta isi kapal sehingga ia menjadi korban yang tak bisa terselamatkan. Semua kerugian telah ditanggung oleh juragan selaku pemilik bagan. Namun, pertanggung jawaban seorang induk semang pada anak buahnya tidak lepas begitu saja, karena semua biaya proses pemakaman Datuak ditanggung oleh induk semang. Uang duka dari induk semang, termasuk juragan-juragan kapal lainnya yang turut memberikan sumbangan sebagai bentuk perhatian mereka kepada siapa saja yang tertimpa musibah terutama diantara kalangan nelayan (*Wawancara*, Silas, tanggal 18 Agustus 2018).

Tidak hanya itu, bentuk pertolongan juragan juga terlihat apabila ada diantara anak bagan yang jatuh sakit, maka juragan memberikan bantuan keringanan berobat. Oleh karena itu, sistem gotong royong dan tolong menolong seperti itu yang melekat pada masyarakat nelayan sedikit banyaknya dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Terutama perekonomian anak bagan yang hanya ditopang oleh seorang juragan.

Kehadiran juragan pemilik kapal tidak hanya dirasakan peranannya oleh kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan saja, tetapi masyarakat sekitar pinggir pantai yang bukan berprofesi sebagai nelayan juga merasakan dampaknya, seperti berikut ini:

1. Berbagi Hasil Tangkapan dengan Tetangga yang Bukan Nelayan

Masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluraristik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Karena, struktur masyarakat pesisir sangat plurar, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya.

Hal menarik adalah bahwa bagi masyarakat pesisir, hidup di dekat pantai merupakan hal yang paling diinginkan, mengingat segenap aspek kemudahan dapat mereka peroleh dalam berbagai aktivitas kesehariannya. Namun, tidak semua masyarakat pinggir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Walaupun topografis Nagari Muaro Gadang Air Haji adalah pantai

dan hamparan Samudera Indonesia, masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan terhitung lebih sedikit yakni 99 orang apabila dibandingkan dengan petani yang berjumlah lebih banyak yaitu 346 orang (*Profil Nagari Muaro Gadang Air Haji tahun 2014*).

Gambar 2
Hasil Tangkapan Ikan Milik Kapal
Juragan



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis tanggal 16 Juli 2018.

Oleh karena itu, hasil tangkapan ikan yang didapatkan senantiasa akan dibagi-bagikan kepada tetangga yang bukan nelayan. Tidak hanya itu, apabila hasil tangkapan membludak, maka siapapun yang ada sewaktu pembongkaran ikan dari kapal ke gudang tempat ikan, akan mendapatkan bagian. Sesuai dengan prinsip seorang juragan sebelum ikan-ikan tersebut ditimbang, maka bagian untuk orang-orang sekitar akan diberikan secara percuma. Bahkan, ketika tetangga

nelayan juragan pemilik kapal melakukan pesta hajatan, seperti perkawinan, sunat rasul, aqiqahan, maka sebagai bentuk pertolongannya, juragan akan memberikan hasil tangkapannya pada tetangganya tersebut. Namun, terkadang ada juga yang dibeli langsung pada juragan, tetapi harga yang ditetapkan oleh juragan lebih rendah dan murah dibandingkan harga pasaran biasanya (*Wawancara Tisna, tanggal 20 September 2018*)

2. Donatur Tetap *Alek* Nagari

Masyarakat pesisir mempunyai sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang khas dan unik. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan sifat usaha dibidang perikanan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perspektif stratifikasi sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogen. Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang beragam. Mereka hidup saling berdampingan dan hidup rukun walaupun dibedakan oleh beragam jenis pekerjaan. Tidak hanya berhubungan baik antar sesama nelayan saja, tetapi juga menjalin kerjasama dengan pemuda dan masyarakat biasa lainnya. Maka, apapun yang telah menjadi rutinitas acara *alek* nagari, seperti festival bola antar kecamatan

yang diadakan oleh pemuda Nagari Labuhan Tanjak Air Haji, acara peringatan hari merdeka, organ tunggal pemuda, serta berbagai bentuk acara lainnya yang dapat dinikmati secara bersama.

Selain menyebarkan proposal pada instansi-instansi terkait, panitia acara biasanya juga membuat *list* donatur penyumbang dana pada juragan-juragan pemilik kapal, yang nantinya nama juragan dengan penyumbang dana terbesar akan disebutkan saat acara berlangsung. Maka, baik dukungan secara moril maupun materil yang diberikan oleh juragan telah mempengaruhi jalannya berbagai bentuk *alek* nagari yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan menjaga stabilitas kelangsungan hidup antar sesam (*Wawancara*, Isap, tanggal 01 Juli 2018).

Karena masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, maka kebudayaan untuk semangat berbagi yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan atau perilaku sosial ekonomi masyarakat pesisir secara umum. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri ekonomi sosial dan budaya masyarakat nelayan terutama

tergambar pada kehidupan nelayan-nelayan juragan adalah memiliki struktur relasi patron-klien yang sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kekayaan, kesuksesan hidup, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi (Kusnadi, 2009: 39)

3. Mengekspor Ikan Hingga ke Luar Propinsi

Selain memiliki bagan sebagai sarana alat tangkap sendiri, seorang juragan juga memasarkan sendiri ikan hasil tangkapan yang didapatkan. Terkadang hasil tangkapan yang didapatkan tidak menentu sesuai dengan musim dan rezeki seorang juragan. Namun, biasanya dalam sekali bagan turun melaut, sedikit banyaknya pasti akan membawa ikan tangkapannya. Karena, metode penangkapan ikan yang diterapkan dengan istilah “mondok”, dimana nelayan yang akan melaut biasanya dalam waktu yang cukup lama mencapai 4-10 hari, hingga hasil tangkapan yang didapatkan mencukupi bekal yang telah dikeluarkan selama melaut. Masyarakat Kenagarian Air Haji biasanya *mondok* hingga ke Pulau Pagai daerah Kepulauan Mentawai. Jauhnya pelayaran bagan-bagan dalam melaut, supaya mendapatkan lebih

banyak hasil tangkapan dan ikan-ikan yang didapatkan berkualitas ekspor. Untuk mengekspor ikan-ikan tersebut hingga ke luar daerah tergantung pada kualitas ikan yang ditangkap.

Gambar 3
Hasil Tangkapan Ikan Ekspor Milik
Kapal Juragan



Sumber: Dokumen Aswardi Bakar
Penyuluh Perikanan
Kecamatan Linggo Sari Baganti

Jenis ikan dengan kualitas ekspor biasanya memiliki harga yang tinggi mencapai Rp.50.000,- satu kilogram, seperti ikan Jenaha, Kerapu, Bawal, dan Tenggiri. Biasanya ikan tersebut paling banyak di ekspor ke Kota Medan. Permintaan ikan di tiap-tiap daerah pun berbeda-beda. Misalnya seperti daerah Dumai, Jambi, lebih cenderung menyukai ikan yang biasa disebut *Kaliang-Kaliang* oleh masyarakat setempat. Sehingga, kegiatan ekspor ini telah membantu memperkenalkan dan mengembangkan

potensi kelautan yang dimiliki oleh Kenagarian Air Haji. Kemudian, berkat kapal-kapal bagan milik juragan inilah kegiatan ekspor ini dapat berjalan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir (*Wawancara*, Ijon, tanggal 01 Juli 2018).

SIMPULAN

Sama seperti masyarakat lainnya, masyarakat nelayan juga tidak luput dari konflik dan dinamika sosial antara sesamanya. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah ancaman terhadap kelangsungan hidup sumberdaya perikanan yang berasal dari praktik-praktik penangkapan yang merusak ekosistem laut, seperti dengan pengeboman, penggunaan sianida dan digunakannya alat tangkap yang merusak. Konflik nelayan muncul terjadi apabila ketidakharmonisan diantara pengguna sumber daya perikanan atau nelayan atau dilanggarnya norma dan kesepakatan dalam prinsip pemanfaatan sumber daya perikanan yang telah disepakati.

Hal semacam ini sudah biasa terjadi, karena karakter nelayan hampir sama kerasnya dengan deburan ombak yang dekat dengan kesehariannya. Namun, konflik yang terjadi masih bisa

diselesaikan dengan jalan perundingan, secara baik dan kekeluargaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya kelompok atau organisasi nelayan telah memberikan sebuah keharmonisan tersendiri bagi nelayan. Baik bagi sesama nelayan, nelayan dengan masyarakat dan nelayan dengan pemerintah. Organisasi telah mempertemukan ketiga elemen ini dan saling bekerja sama untuk memajukan perekonomian masyarakat khususnya ekonomi berbasis kelautan bagi masyarakat pesisir pantai. Organisasi secara tak langsung telah memberikan secercah pengharapan bagi nelayan untuk merubah hidup supaya keluar dari belenggu kemiskinan. Meskipun hasil yang didapatkan belum maksimal, tetapi telah menjadi dinamika konflik sosial dalam kehidupan masyarakat nelayan.

Hubungan harmoni masyarakat nelayan semakin terlihat pada hubungan kekeluargaan antara juragan dan anak buahnya. Hal ini dapat terlihat, karena dalam masyarakat nelayan telah terjadi hubungan patron-klien. Patron adalah juragan yang merupakan nelayan juragan pemilik modal, sedangkan klien adalah nelayan buruh, pekerja ataupun anak buah dari juragan. Kehadiran patron ini memiliki status dan peranan

sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat nelayan, karena patron “bak dewa peyelamat” bagi seorang klien ketika kesusahan datang melanda. Oleh karena itu, dengan segala bentuk dominasi yang dilakukan oleh juragan secara konkrit tidak dirasa oleh klien atau anak bagan karena telah tertutupi dengan sejumlah bantuan yang diberikan oleh juragan, baik juragan maupun anak bagan tidak merasa terindimidasi dan mengintimidasi, karena mereka saling membutuhkan dan dibutuhkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmita, Rahardjo, 2015. *Pembangunan Wilayah, Kepulauan, Kelautan Maritim, Terisolasi, Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Archipelago dan Semeja*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asnan, Gusti, 2007. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, Yogyakarta: Ombak.
- Damsar dan Indrayani, 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gottschalk, Louis, 2007. *Mengerti Sejarah*, Yogyakarta: Ombak.
- Hamid, Abd Rahman, 2015. *Sejarah Maritim Indonesia*, Yogyakarta: Ombak.
- Kato, Tsuyoshi, 1986. *Rantau Pariaman Dunia Pesisir Minangkabau Abad XIX* dalam Akira Nagazumi, Indonesia dalam Kajian Sardjana Jepang, Jakarta: YOI.

- Kinseng, Rilus A, 2011. *Konflik Kelas Nelayan di Indonesia, Tinjauan Kasus Balik Papan*, Bogor: IPB Press.
- Koran Singgalang “Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Diseleksi” Edisi Selasa 28 Agustus 2012
- Kusnadi, 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Lapian, AB, 2011. *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut*, Jakarta: Komunitas Bambu.
- Nina Purniati, “Konflik Nelayan di Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, Studi Kasus: Air Haji Tanjung Kandis dan Pulau Rajo Inderapura” *Skripsi*, Padang: STKIP PGRI Sumatera Barat
- Nur, Mhd 2000. “Bandar Sibolga di Pantai Barat Sumatera pada Abad ke 19 Sampai Pertengahan Abad ke-20”, *Disertasi*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan*, www.pesisirselatan.kab.go.id diakses pada tanggal 29 Juli 2018.
- Rian. “Sejarah Nagari Air Haji Kab.Pesisir Selatan,” diakses dari [www.ANAK.PASISIA_Sejarah Nagari Air Haji Kab. Pesisir Selatan.html](http://www.ANAK.PASISIA_Sejarah_Nagari_Air_Haji_Kab._Pesisir_Selatan.html), Sabtu 03 Februari 2018
- Satria, Arif, 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Cidesindo.
- Sjamsudin, Helius. 2012, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak.
- Sudirman, 2013. *Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sufirudin, “Hubungan Patron-Klein Diantara Masyarakat Nelayan di Desa Kangkunawe Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Holistik* No.17A, Januari 2016
- Zed, Mestika, 1999. *Metodologi Sejarah*, Padang: Universitas Negeri Padang.
- Zubir, Zaiyardam, 2008. *Laporan Penelitian Profil Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan*, Padang: Kerjasama Bappeda Pesisir Selatan dan PSH Unand